

HAMBATAN TURKI UNTUK MENJADI ANGGOTA UNI EROPA PADA MASA PRESIDEN ERDOGAN

Oleh: Sarah Khairiyah Nasution

(sarahkhairiyahnst3898@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si

Bibliografi: 25 Jurnal, 15 Buku, 5 Laporan Resmi, 40 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Over the decades, The relationship between Turkey and European Union has been marked with many agreements and convergentions, in shape of economic, cultural, and social life exchanges which are rooted between The Ottoman Empire and European's power. Turkey has become one of a countries as well as partner that has an important role for the European Union, or vise versa. The process of Turkey's bid to become part of the European Union has been going on for a long time. Since 1963, Turkey has participated in the regional integration of the European Economic Community, which is now a pioneer of European Union shaping. Turkey has made many policy changes in its country to fulfill the criterias given by the European Union.

In examining this phenomenon, the author uses Neorealism perspective. Neorealism sees that it is natural for the European Union to hinder Turkey's efforts to become part of its organization, because the European Union has its own interests in maintaining its internal security and identity. The theory used to support this research is The Complex Regional Security Theory. This theory emphasizes that there are boundaries made by the European Union outside of itself, so that even though the European Union has cooperated with Turkey, there is no mixing of identity which requires the European Union to accept Turkey as its member.

Through this research, the author formulate, the hurdles that Turkey experiences to become the member of European Union are divided into four different fields, namely politics and security, economy, human rights and democracy, and socio-culture. Until now, Turkey's effort to be accepted as the member of European Union have often met with stalemates and rejection from European Union heads of state.

Keywords: Turkey, European Union, Hurdles

PENDAHULUAN

Hubungan antara Turki dan Uni Eropa telah ditandai dengan

berbagai kerjasama dan konvergensi, dalam bentuk pertukaran ekonomi, seni budaya, bahkan kehidupan sosial yang mengakar antara Kekaisaran Ottoman dan kekuatan Eropa selama berabad-abad. Turki mengklaim dirinya telah menjadi bagian dari Dunia Barat meskipun memiliki dominasi Muslim. Turki secara geografis terbagi menjadi dua, yaitu Eropa di utara dan Asia di selatan, yang menjadikan Turki penghubung antara benua Eropa dan Asia.¹ Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan keduanya dalam berbagai aspek serta menjadikan Turki salah satu negara sekaligus mitra yang memiliki peranan penting bagi Uni Eropa, maupun sebaliknya.

Setelah sebelumnya, sejarah membuktikan telah banyak kedekatan historis serta kerjasama yang terjalin antara Turki dan kekuatan Uni Eropa. Namun, dinamika pasang surut hubungan Turki dan Uni Eropa menghadirkan celah bagi hambatan-hambatan untuk hadir merintang upaya *aksesi* Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: **“Apa bentuk hambatan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa pada masa pemerintahan Presiden Erdogan?”**.

KERANGKA TEORI

Perspektif penulis dalam penelitian ini merupakan neorealisme. Paham Neorealisme mengimplikasikan

¹ Mangaratua Sihombing, “Perluasan Keanggotaan Uni Eropa Berdasarkan Traktat Maastricht 1992 dan Kriteria Copenhagen 1993 dalam Proses Penerimaan Turki di Uni Eropa”, 2014.

bahwa, dalam bentuknya yang sekarang, negara bangsa adalah perangkat permanen dalam sistem internasional. Neorealis berpandangan luas bahwa *power* adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Dalam pandangan neorealisme, teori hubungan internasional yang terbaik adalah yang memfokuskan pada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan dan perubahan sistem.

Neorealisme sebenarnya bukan teori tentang politik luar negeri dan merupakan bagian dari teori hubungan internasional, tetapi secara tidak langsung konsep-konsep dan penjelasan neorealisme bisa di gunakan juga sebagai landasan untuk memahami perilaku politik luar negeri di setiap-negara. Dalam kaitan perspektif ini dengan arah penelitian, penulis melihat hambatan-hambatan yang diberikan Uni Eropa terhadap usaha Turki untuk bergabung menjadi bagiannya adalah hal yang wajar, karena Uni Eropa harus menjaga identitas serta kepentingan internal organisasinya. Uni Eropa secara tidak langsung memandang Turki sebagai ancaman bagi organisasinya.

Teori yang penulis gunakan di sini adalah Teori Kompleks Keamanan Kawasan (*Regional Security Complex Theory*). Buzan dan Waever dalam bukunya *Regions and Powers: The Structures of International Security*, mengemukakan Teori Kompleks Keamanan Kawasan sebagai satu set unit yang proses utama sekuritisasi, desekuritisasi atau keduanya saling terkait sehingga masalah keamanan mereka tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara terpisah satu sama

lain.² Karakter *security complex* yang mencakup “*interdependence of rivalry as well as that of shared interest*” oleh Buzan diistilahkan dengan “*pattern of amity and enmity among states.*” *Amity* adalah hubungan antarnegara yang terjalin mulai dari rasa persahabatan sampai ekspektasi akan mendapatkan dukungan atau perlindungan satu sama lain.

Sementara itu, Buzan menggambarkan *enmity* sebagai suatu hubungan antarnegara yang terjalin atas dasar kecurigaan dan rasa takut satu sama lain. *Pattern of amity/enmity* ini dapat muncul dan berkembang akibat berbagai isu yang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat *distribution of power* yang ada di antara negara-negara terkait. *Pattern of amity/enmity* dapat datang dari berbagai hal yang bersifat spesifik seperti:

1. Sengketa perbatasan.
2. Kepentingan yang berkaitan dengan etnis tertentu.
3. Pengelompokan ideologi dan warisan sejarah lama baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif.
4. Distribusi kekuasaan di antara negara negara atau di kawasan tertentu.

Dalam kaitannya dengan fenomena yang diteliti penulis. Teori ini menekankan bahwa terdapat batasan yang dibuat oleh Uni Eropa diluar dirinya, sehingga meskipun Uni Eropa telah menjalin kerjasama dengan Turki, tidak lantas terjadi pembauran identitas yang mengharuskan Uni Eropa menerima Turki menjadi anggotanya.

² Barry Buzan, Ole Waever, *Regions and Powers: The Structures of International Security*, Cambridge University Press, 2003.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis berfokus terhadap apa saja hambatan-hambatan yang dialami Turki terhadap upaya untuk menjadi anggota Uni Eropa, yang dikelompokkan pada empat bidang yang berbeda yaitu politik dan keamanan, ekonomi, HAM dan demokrasi, dan sosial budaya.

Kebijakan Perluasan Uni Eropa

Penerimaan anggota baru Uni Eropa telah diatur dalam pasal 49 *Treaty of European Union*, bahwa Dewan Uni Eropa harus bulat setuju untuk membuka negosiasi, setelah berkonsultasi dengan Komisi Eropa dan menerima persetujuan resmi dari Parlemen. Kondisi penerimaan, periode transisi, dan penyesuaian terhadap semua Treaty yang mendasari pembentukan Uni Eropa harus menjadi subyek perjanjian antara negara pemohon dengan negara anggota.³

Negara pemohon dan Uni Eropa menandatangani *the European Agreement* yang menjadi dasar hukum bagi kerjasama antara kedua belah pihak untuk meningkatkan perdagangan bebas antara negara pemohon dengan Uni Eropa, berdasarkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut meliputi hubungan perdagangan bebas, dialog politik dalam bidang hukum; kebebasan dalam pergerakan modal, barang serta individu ; dan bidang-bidang kerjasama lainnya seperti industri, lingkungan hidup, transportasi serta bea cukai.

³ “About The EU”, <https://europa.eu>, (diakses pada 10 Juli 2020).

Pada bulan Juni 1993, *Copenhagen European Council* mengakui hak negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung dengan Uni Eropa apabila mereka memenuhi tiga kriteria, yakni:

- a. Adanya institusi yang stabil, yang dapat menjamin berjalannya demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia dan perlindungan terhadap minoritas;
- b. Adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni Eropa;
- c. Kemampuan memenuhi kewajiban keanggotaan termasuk taat pada cita-cita politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa.⁴

Apabila negara pemohon dianggap telah dan mampu memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka proses ini akan berlanjut dengan dibukanya negosiasi penerimaan. Sebelum negosiasi dibuka, dilakukan suatu evaluasi terhadap undang-undang negara tersebut untuk mempersiapkan suatu program kerja dan menentukan posisi negosiasi. Setelah itu, negosiasi dimulai dalam bentuk *Intergovernmental Conference bilateral* (Uni Eropa dan negara pemohon), mempertemukan para menteri setiap enam bulan dan duta besar setiap bulan. Reformasi ekonomi-politik yang dilakukan negara pemohon dimonitor serta dipelajari secara berkala dan laju negosiasi ditentukan oleh hasil penilaian tersebut.⁵

⁴ Agenda 2000: *For A Stronger and Wider Union*, 1997, hlm. 6.

⁵ *Ibid.*

Upaya Turki Untuk Menjadi Anggota Uni Eropa

Secara formal, Turki mengajukan proposal lamaran untuk dapat bergabung ke dalam Uni Eropa pertama kali saat kepemimpinan Presiden Kenan Evran (1982-1989) yang diprakarsai oleh Turgut Ozal selaku perdana menteri Turki, pada tanggal 14 April 1987. Pengajuan aplikasi keanggotaan Turki, dilakukan oleh Ali Bozer Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri Turki ke Brussel, terhadap dewan Uni Eropa. Perkembangan sepanjang dekade 1990 menunjukkan hubungan Turki dengan UE mulai memasuki tahap baru yang dapat mendorong ikatan yang lebih erat antara Turki dan Uni Eropa. Salah satunya ialah proses aksesi Turki yang ditegaskan dalam Kriteria Copenhagen, dimana Turki harus dapat memenuhi beberapa kriteria.

Uni Eropa juga menuntut Turki untuk mengadopsi seluruh ketentuan yang ada agar dapat masuk ke dalam proses aksesi, terutama mengenai penyelesaian masalah internal Turki dan hubungan bilateral dengan Siprus Yunani. Permintaan Uni Eropa disanggupi Turki dengan terus mereformasi undang-undang dan perbaikan mengenai demokrasi, hukum, ekonomi, kebebasan berekspresi dan beragama, HAM, hak wanita dan buruh, sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Uni Eropa.⁶

Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2005 perundingan aksesi Turki ke Uni Eropa memasuki tahap baru

⁶ Agustiani Dewi, "Penolakan Prancis Terhadap Pengajuan Keanggotaan Turki di Uni Eropa pada Tahun 2007-2012", Skripsi HI FISIP UIN Jakarta: Tahun 2014, hlm. 29

lagi, yang dikenal dengan Perundingan Luksemburg tentang proses keberlanjutan aksesinya untuk Turki serta terkait dengan hambatan yang dihadapi Turki dalam proses aksesinya yang diberikan Uni Eropa. Diantara hambatan itu ialah lambannya langkah Turki untuk demokratisasi dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan ketetapan Uni Eropa.

Babak paling bersejarah selama perjuangan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa ialah pada tanggal 3 Oktober 2005 karena Uni Eropa secara resmi bersedia membuka dialog membahas kelanjutan aksesinya Turki, melalui forum Perundingan Luksemburg. Perdana Menteri Turki pada saat itu, Recep Tayyip Erdogan (selanjutnya menjadi Presiden Turki pada 2014 – sekarang) berhasil mewujudkan perkembangan yang signifikan, yang tidak dapat dilakukan Perdana Menteri terdahulu. Hal ini makin menggugumkan mengingat Erdogan sendiri adalah Perdana Menteri yang berideologi Islam, mengingat Turki dapat dikatakan sangat sekuleristik pada saat itu.

Namun disaat yang bersamaan, pada perundingan tersebut Uni Eropa sekaligus memaparkan observasinya terkait perkembangan Turki yang dirasa akan menjadi hambatan yaitu mengenai pemenuhan hak demokrasi dan perlindungan HAM, dimana dari hasil observasi Uni Eropa, pemerintah Turki kerap kali memberikan perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas Kurdi. Uni Eropa menilai Turki belum sepenuhnya mengamalkan *Criteria Copenhagen*. Masalah selanjutnya adalah Uni Eropa ingin Turki mengakui Republik Siprus sebagai sebagai satu kesatuan dan menarik

sebanyak 40.000 pasukan angkatan bersenjata Turki yang berjaga di wilayah utara Siprus, namun Turki menolak permintaan Uni Eropa tersebut. Karena hal ini, proses aksesinya Turki tertunda. Sampai pada tahun 2006 tepatnya Perundingan kembali dilaksanakan oleh Uni Eropa. Melalui perundingan itu, Komisi Eropa merekomendasikan untuk menghentikan sementara proses aksesinya Turki.

Dewan Eropa pada perundingan Uni Eropa pada Desember 2006 itu memberikan hasil observasinya terkait aksesinya Turki menuju Uni Eropa yaitu, Turki tidak sepenuhnya mengimplementasikan 35 bab dalam *Acquis Communautaire* sebagai syarat menjadi anggota Uni Eropa. Tersisa 8 bab lagi diantaranya bab mengenai pergerakan bebas produksi barang, hak dan kebebasan menyalurkan pelayanan, pelayanan finansial, pengembangan pertanian dan daerah tertinggal, pemanfaatan hasil laut, kebijakan transportasi, dan hubungan eksternal. Oleh karenanya pada perundingan itu Uni Eropa memutuskan untuk menunda negosiasi 8 bab tersebut.

Selama proses penundaan dari tahun 2006 sampai 2007, upaya Turki kembali mendapat ujian dikarenakan pada tahun 2007 Jerman, Austria, dan Perancis sepakat untuk menolak proses aksesinya Turki atas berbagai alasan. Setelah penundaan dan rintangan yang diterima Turki, Turki tidak serta merta menyerah. Pada tahun 2008-2012, Turki melakukan reformasi besar-besaran pada bidang yang menjadi fokus utama Kebijakan Perluasan Uni Eropa yaitu bidang ekonomi dan politik. Reformasi besar-besaran ini dilakukan untuk mencapai norma-norma dan standar tertinggi di bidang demo-

krasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.⁷

Hal ini membuahkan hasil karena berdasarkan laporan Komisi Uni Eropa yang diterbitkan pada 12 Oktober 2011, mengusulkan untuk dilakukan agenda positif yaitu membuka dialog intensif membahas berbagai masalah seperti politik, perang terhadap terorisme, visa, mobilitas dan migrasi, serta beberapa negosiasi akses lainnya yang belum dapat dibuka. Proposal ini dianggap menguntungkan sebagai instrumen untuk mendukung dan melengkapi proses negosiasi Turki dengan Uni Eropa.⁸

Hambatan Turki Untuk Menjadi Anggota Uni Eropa Pada Masa Presiden Erdogan

Dalam merumuskan berbagai hambatan yang dialami Turki dalam upaya meraih keanggotaan di Uni Eropa, penulis mengelompokkan hambatan-hambatan tersebut ke dalam empat bidang berbeda yaitu hambatan bidang politik dan keamanan, hambatan bidang ekonomi, hambatan bidang HAM dan demokrasi, serta hambatan bidang sosial dan budaya.

A. Hambatan Bidang Politik dan Keamanan

Dari aspek politik dan keamanan, hambatan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dapat dilihat melalui sikap Turki yang tidak mengakui keberadaan Etnis Siprus

Yunani. Hambatan bagi Turki ditanggapi oleh Uni Eropa sebagai salah satu ketidak siapan Turki dalam menghadapi sengketa antar negara Uni Eropa. Tidak adanya pengakuan Turki terhadap Siprus mengindikasikan akan sulitnya Turki bergabung dengan Uni Eropa, hal ini karena Siprus telah resmi menjadi anggota Uni Eropa yang memiliki hak veto yang memiliki kemampuan untuk menolak maupun mengizinkan negara-negara aplikasi yang ingin menjadi anggota Uni Eropa. Hak veto Siprus sangat berpengaruh, karena apabila salah satu negara tidak setuju untuk memasukan salah satu negara maka negara tersebut tidak akan di terima menjadi negara anggota Uni Eropa.

Selanjutnya kudeta yang terjadi di Turki pada tahun 2016 lalu mengguncang kehidupan perpolitikan dalam negeri Turki. Kudeta militer yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa pasukan militer untuk mnejatuhkan pemerintahan Presiden Erdogan. Saat itu, militer menduduki posisi posisi yang strategis di seluruh Istanbul dan Ankara. Para oknum militer meluncurkan tank ke jalanan kota dan juga Bandara Internasional Istanbul, pesawat terbang di atas kepala dan kendaraan militer dikelilingi tentara, bahkan dua jembatan utama Istanbul, Bophorus dan Fatih Sultan Mahmet diblokir tentara.⁹

Uni Eropa melihat kondisi dalam negeri Turki menjadi tidak aman sehingga kudeta ini semakin mengaburkan citra Turki di mata Uni Eropa

⁷ Ministry for EU Affairs Republic of Turkey, “*Relations with the European Union in the Field of Environment*”, <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa> (diakses pada tanggal 22 Maret 2019)

⁸ *Ibid.*

⁹ “Kronologi Kudeta Berdarah Militer Turki”, <http://m.tempo.co>, (diakses pada 5 September 2020)

dalam usaha Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa menyatakan Turki telah mengalami kemerosotan dalam usaha memastikan keamanan dalam negerinya.¹⁰ Situasi yang terjadi di Turki pada saat kudeta tahun 2016 merupakan situasi yang paling kritis bagi negara Turki.¹¹

B. Hambatan Bidang Ekonomi

Kerja sama perekonomian antara Turki dan Uni Eropa telah dimulai sejak lama bahkan sebelum Uni Eropa terbentuk. Permasalahan bidang ekonomi yang dihadapi oleh Turki adalah mengupayakan agar ekonomi Turki dapat bertahan. Ekonomi Turki meningkat cukup drastis, namun bukan berarti peningkatan ekonomi tersebut dapat diterima begitu saja dalam arus perdagangan Uni Eropa. Pertahanan ekonomi berkaitan erat dengan kondisi politik dan hubungan internasional suatu negara.

Kondisi politik Turki yang sangat mengawatirkan dapat membuat investor asing mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Turki dan beberapa perusahaan Jerman di Turki juga mengalami kesulitan karena gejolak politik di Turki. Kekuatan stabilitas negara bukan hanya tentang ekonomi saja namun juga politik serta keamanan, jika kondisi politik dan keamanan Turki terus menurun maka akan memungkinkan perekonomiannya jatuh dan hal itu akan berdampak besar bagi Uni Eropa.

Apabila dilihat melalui Kriteria Kopenhagen mengenai kriteria ekonomu yang ditetapkan dewan Uni Eropa yang berbunyi “ekonomi pasar

yang berfungsi dan kemampuan untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan pasar di dalam UE”, jelas Turki telah memenuhi Kriteria ini karena Turki adalah negara dengan ekonomi yang menjanjikan.

Namun, jika merujuk pada negara Kroasia yang bisa dikatakan satu angkatan dengan Turki dalam mengajukan keanggotaan Uni Eropa, dan pada tahun 2013 sudah terlebih dahulu diterima keanggotaannya secara penuh oleh Uni Eropa, ada sedikit kejanggalan yang terjadi pada standarisasi ekonomi yang ditetapkan Uni Eropa kepada kedua negara. Saat diterima menjadi anggota Uni Eropa, ekonomi Kroasia dapat dikatakan sedang sangat anjlok. Data *World Bank* mencatat bahwa pertumbuhan GDP Kroasia pada tahun 2012 adalah -2.238%.¹² Selanjutnya pada tahun 2013 disaat Kroasia diterima menjadi anggota Uni Eropa, ekonomi negara tersebut pun tidak kunjung membaik dengan GDP tercatat di angka -0.549%.¹³ Sangat berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian Turki pada tahun tersebut melalui data *World Bank* tercatat pada tahun 2012 GDP turki menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4.79%, lalu naik tajam di tahun 2013 sebesar 8.491%.¹⁴ Melalui

¹² “World Bank Croatia’s GDP 2012-2013”, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2013&locations=HR&start=2012>, diakses pada 20 September 2020.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ World Bank Turkey’s GDP 2012-2013, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP>.

¹⁰ Turkey Progress Report 2016.

¹¹ *Ibid.*

perbandingan ini tentu Turki sebagai pemilik ekonomi besar saat itu seharusnya lebih diunggulkan untuk menjadi anggota Uni Eropa daripada Kroasia.

Berdasarkan analisis ini, dapat diartikan bahwa Uni Eropa telah menghambat Turki untuk meraih keanggotaan penuh Uni Eropa dalam bidang Ekonomi karena seharusnya Turki lebih layak diterima oleh Uni Eropa dibandingkan Kroasia

C. Hambatan Bidang HAM dan Demokrasi

Berdasarkan Kriteria Kopenhagen 1993, komisi Uni Eropa menetapkan adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai salah satu dari kriteria politik yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk akses ke Uni Eropa.¹⁵ Sejak tahun 2014-2019, Uni Eropa menemukan permasalahan hak asasi manusia yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan oleh Turki untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia dari 3 parameter, yaitu diskriminasi terhadap etnis Kurdi, diskriminasi terhadap komunitas LGBT, dan pelanggaran kebebasan pers.

Awal mula konflik pemerintahan Turki dengan etnis Kurdi ialah saat etnis Kurdi mendirikan *Partiya Karkaran Kurdistan* (PKK) atau Partai Pekerja Kurdi dibawah kepemimpinan Abdullah Ocalan pada tahun 1978 sebagai

bentuk upaya mereka untuk memerdekakan diri. Bagi pemerintah Turki sendiri, terutama kalangan militer, kehadiran PKK dianggap menciptakan ketidakstabilan, memperlemah kondisi ekonomi, politik dan integritas wilayah Turki. PKK dianggap sebagai pencipta teror dengan aksi-aksi terorismenya.

Sikap pemerintah Turki terhadap suku Kurdi selama ini dianggap tidak manusiawi, penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan pemerintah Turki membuat sebagian masyarakat dari suku Kurdi melakukan migrasi. Dalam usaha penyelesaian konflik antara pemerintah Turki dengan etnis Kurdi juga menarik perhatian kalangan internasional dan seringkali menghambat langkah Turki untuk memainkan perannya di percaturan dunia, khususnya Eropa, antara lain dengan belum diterimanya secara penuh proses keanggotaan Turki di Uni Eropa dengan alasan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Turki.

Uni Eropa menemukan masalah diskriminasi dan stereotip negatif terhadap LGBTI (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex*) yang terus berlanjut.¹⁶ Dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBTI, Turki menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke-46 dibandingkan 49 negara-negara Eropa pada tahun 2016.¹⁷ Sedangkan pada tahun 2017, Turki masih menempati

MKTP.KD.ZG?end=2013&locations=TR&start=2012

¹⁵ European Integration Online Papers, <http://eiop.or.at/eiop/>, diakses pada 5 September 2020.

¹⁶ Turkey Progress Report 2014-2019.

¹⁷ Rainbow Europe, <http://rainbow-europe.org>, 2016, diakses pada 5 September 2020.

peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 47 dari 49 negara-negara Eropa dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBTI.¹⁸ Secara keseluruhan, upaya harus terus dilakukan untuk memerangi diskriminasi terhadap LGBTI.¹⁹

Turki begitu ketat dalam hal LGBTI. Uni Eropa mencatat ‘moralitas umum yang menyebabkan Turki begitu ketat dalam hal LGBTI yang didukung mayoritas publik Turki sebanyak 88,8% menolak LGBTI.²⁰ Turki memang berupaya menjamin adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir melalui pasal 26 pada konstitusinya yang terbaru. Namun tidak ada jaminan bagi para pelaku LGBTI untuk menggunakan hak ini.

Kehidupan Media dan pers di Turki merupakan salah satu yang paling bergejolak di dunia. Sebagai negara demokratis dengan bentuk republik presidensial, negara ini sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan pers, namun pada kenyataannya, sejak tahun 1992, negara ini telah melakukan tindakan represif yang begitu kuat terhadap para jurnalis. Sejak tahun tersebut kurang lebih ratusan jurnalis baik jurnalis lokal maupun luar negeri ditangkap oleh pihak otoritas negara dan 25 jurnalis Turki meninggal. Hal ini membuktikan

begitu emahnya perlindungan hukum bagi jurnalis di Turki.²¹

Uni Eropa menemukan permasalahan dalam hal kebebasan media dan kebebasan berekspresi. Tercatat hingga bulan Juli 2015, dua saluran TV yang kritis terhadap pemerintah ditutup paksa oleh polisi. Pemerintah Turki melalui Presidensi Komunikasi dan Telekomunikasi (TIB) juga memblokir 76.000 website tanpa putusan pengadilan.²² Belum maksimalnya pemenuhan atas kebebasan pers merupakan hambatan paling dominan yang selalu dipaparkan dan dievaluasi oleh Uni Eropa pada Turkey Progress Report dari tahun 2014 sampai 2019.

D. Hambatan Bidang Sosial Budaya

Turki secara historis merupakan rival bagi bangsa Eropa karena militernya, kedekatan fisik dan agama serta tradisi yang kuat dan saling bersaing satu sama lain²³ Turki, dalam pandangan masyarakat Eropa, dianggap sebagai Muslim dan dengan demikian sebagai wakil dari agama Islam, sebuah agama yang pada saat itu terlalu penting untuk tidak dianggap sebagai ancaman.²⁴ Perbedaan Eropa dengan Turki tersebut, meski telah terjadi sejak lama, hingga saat ini tidak kunjung memudar, karena pada dasarnya perbedaan tersebut merupa-

¹⁸ Rainbow Europe, <http://rainbow-europe.org>, 2017, diakses pada 5 September 2020.

¹⁹ Turkey Progress Report 2017.

²⁰ Volkan Yilmaz dan Sinan Birdal, “LGBT Rights in Turkey: The Long Road To Tolerance”, <http://e-ir.info>, diakses pada 5 September 2020.

²¹ CPJ, *Journalists Killed in Turkey*, diakses dalam: <https://cpj.org/killed/europe/turkey/> (diakses pada 21 September 2020).

²² Turkey Progress Report 2015.

²³ I.B. Neumann, *Uses of the Other: “The East” in European identity formation*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.

²⁴ *Ibid.*

kan perbedaan dari ide yang sangat mendasar, yaitu dari dikotomi antara Islam dan Kristen.

Menurut Samuel Huntington, bagi suatu negara untuk mengambil identitas baru di dalam suatu peradaban, sangat penting bahwa unsur dominan dalam peradaban tuan rumah harus bersedia untuk menerima perubahan dan identitas baru tersebut. Tidak heran upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa telah terbukti menjadi kontroversial: dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Muslim, Turki dianggap sebagai “the other” atau orang luar bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Agama tetap menjadi perbedaan besar budaya utama antara Uni Eropa dan Turki, dan ini menjadi signifikan karena akar agama Kristen juga salah satu faktor yang dimiliki oleh semua 28 negara anggota Uni Eropa hingga saat ini.²⁵ Inilah sebabnya mengapa identitas budaya Uni Eropa pasti akan menjadi identitas yang secara tegas berakar dari kekristenan.

PENUTUP

Kedekatan yang terjalin antara Turki dan Uni Eropa telah berlangsung sejak presiden pertama Turki setelah Kekaisaran Turki Utsmani runtuh, Mustafa Kemal Attaturk memimpin. Pemerintah Turki yang semula menganut sistem kekhilafahan Islam dan dipimpin oleh seorang Sultan, berubah drastis bentuk negaranya menjadi Republik Sekuler. Faktor ekonomi dan

politik menjadi pemicu utama keinginan Turki ingin bergabung dengan Uni Eropa. Dari segi ekonomi apabila Turki bergabung dalam Uni Eropa, masyarakat Turki akan memperoleh kemudahan untuk bermigrasi ke negara-negara Eropa dan hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi domestik Turki.

Berdasarkan *Treaty on the European Union*, untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus memiliki demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, hak-hak asasi manusia dan perlindungan kaum minoritas, serta negara tersebut juga harus memiliki ekonomi pasar yang berfungsi serta administrasi publik yang dapat menerapkan dan mengelola undang-undang Uni Eropa. Ketika suatu negara yang telah memenuhi kriteria Kopenhagen dan ditetapkan menjadi kandidat resmi untuk keanggotaan penuh, negara tersebut kemudian diarahkan menuju perundingan keanggotaan formal, Turki melakukan berbagai perubahan kebijakan di negaranya agar dapat memenuhi *Copenhagen Criteria*, beberapa perubahan tersebut seperti mengubah ideologi negara menjadi lebih sekuler dengan menghapus identitas Islam pada fasilitas umum, serta memberlakukan aturan yang berdasar demokrasi dan HAM.

Namun dalam perjalanannya, akses Turki menuju Uni Eropa menuai beragam hambatan. Hambatan yang ditemukan antara lain dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi, serta sosial dan budaya. Pada bidang politik, penolakan Turki untuk mengakui Republik Siprus dan Kudeta oleh kelompok militer Turki yang ter-

²⁵ Eleanor Zeff dan Ellen B. Pirro, *European Union and the Member States*, USA: Lynne Rienner Publisher, 2006.

jadi pada tahun 2016 menjadi hambatan serius pada proses keanggotaan Turki. Selanjutnya pada bidang ekonomi, perbedaan standar ekonomi Turki dan negara Uni Eropa juga menjadi rintangan Turki. Pada bidang HAM dan demokrasi, berbagai sikap diskriminatif Turki terhadap Etnis Kurdi, kelompok LGBTI, dan pers, dinilai Uni Eropa menghambat proses keanggotaan Turki. Terakhir, perbedaan akar budaya serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Turki yang mayoritas beragama Muslim dengan komunitas Eropa yang sekuler menjadi hambatan yang signifikan bagi Turki untuk meraih keanggotaannya di Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenda 2000: *For A Stronger and Wider Union*, 1997.
- Agustiani Dewi, “Penolakan Prancis Terhadap Pengajuan Keanggotaan Turki di Uni Eropa pada Tahun 2007-2012”, Skripsi HI FISIP UIN Jakarta: Tahun 2014
- Barry Buzan, Ole Waever, *Regions and Powers: The Structures of International Security*, Cambridge University Press, 2003.
- CPJ, *Journalists Killed in Turkey*, diakses dalam: <https://cpj.org/killed/europe/turkey/> (diakses pada 21 September 2020).
- Europa.eu, “About The EU”, <https://europa.eu>, (diakses pada 10 Juli 2020).
- Eleanor Zeff dan Ellen B. Pirro, *European Union and the Member States*, USA: Lynne Rienner Publisher, 2006.
- European Integration Online Papers, <http://eiop.or.at/eiop/>, diakses pada 5 September 2020.
- I.B.Neumann, *Uses of the Other: “The East” in European identity formation*, Minneapolis: University of Minesota Press, 1998.
- Mangaratua Sihombing, “Perluasan Keanggotaan Uni Eropa Berdasarkan Traktat Maastricht 1992 dan Kriteria Copenhagen 1993 dalam Proses Penerimaan Turki di Uni Eropa”, 2014.
- Ministry for EU Affairs Republic of Turkey, “*Relations with the European Union in the Field of Environment*”, <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa> (diakses pada tanggal 22 Maret 2019)
- Rainbow Europe, <http://rainbow-europe.org>, 2016, diakses pada 5 September 2020.
- Rainbow Europe, <http://rainbow-europe.org>, 2017, diakses pada 5 September 2020.
- Tempo.com, “Kronologi Kudeta Berdarah Militer Turki”, <http://m.tempo.co>, (diakses pada 5 September 2020)
- Turkey Progress Report 2014.
- Turkey Progress Report 2015.
- Turkey Progress Report 2016.
- Turkey Progress Report 2018.
- Turkey Progress Report 2019
- Volkan Yilmaz dan Sinan Birdal, “LGBT Rights in Turkey: The Long Road To Tolerance”, <http://e-ir.info>, di-

akses pada 5 September 2020.

World Bank Croatia's GDP 2012-2013",
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2013&locations=HR&start=2012>, diakses pada 20 September 2020.

World Bank Turkey's GDP 2012-2013,
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2013&locations=TR&start=2012>